



**RISALAH RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,
SERTA PERUM BULOG**

Tahun Sidang	:	2018 – 2019
Masa Persidangan	:	III
Rapat ke-	:	-
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja (Raker)
Sifat Rapat	:	Tertutup – Terbuka Menteri Kelautan dan Perikanan
Dengan	:	Dihadiri oleh Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia, Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero), dan Direktur Utama PT Garam (Persero)
Hari, Tanggal	:	Senin, 21 Januari 2019
Waktu	:	14.00 WIB s.d. Selesai
Acara	:	1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018; 2. Rencana Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019; 3. Temuan Hasil Kunjungan Reses; dan 4. Isu-isu Penting.
Ketua Rapat	:	Edhy Prabowo, M.M., M.B.A. (Ketua Komisi IV DPR RI)
Sekretaris Rapat	:	Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir	:	25 Anggota dari 49 Anggota Komisi IV DPR RI Menteri Kelautan dan Perikanan, Direktur Utama Perum
Hadir Mitra Kerja	:	Perikanan Indonesia, Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero) dan Direktur Utama PT Garam (Persero)

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

1. EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.
2. Drs. H. ROEM KONO
3. VIVA YOGA MAULADI, M.Si.
4. DANIEL JOHAN
5. SUDIN
6. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S.
7. RAHMAD HANDOYO, S.Pi, M.M.
8. ROBEERT JOPPY KARDINAL, S.A.B.
9. A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA

10. H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.
11. ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H., M.Hum.
12. Ir. EDDY KUNTADI
13. H. OO SUTISNA, S.H.
14. Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A.
15. G. BUDISATRIO DJIWANDONO
16. dr. FELICITAS TALLULEMBANG
17. Dr. Drs. YUS SUDARSO, S.H., M.H.
18. EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos.
19. M. IRWAN ZULFIKAR, M.B.A.
20. Drs. H. IBNU MULTAZAM
21. H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S.Ag.
22. Dr. HERMANTO, S.E., M.M.
23. Hj. KASRIAH
24. Drs. FADHOLI
25. Dr. ERISLAN, S.T., M.M.

ANGGOTA YANG IJIN:

1. Dr. MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.
2. Drs. I MADE URIP, M.Si.
3. Ir. MINDO SINAIPAR
4. ONO SURONO, S.T.
5. Ir. EFFENDI SIANIPAR
6. RIDWAN ANDI WITTIRI
7. Ir. TAGORE ABUBAKAR
8. DJENDRI ALTING KEINTJEM, S.H., M.H.
9. H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.
10. Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.
11. SUSI SYAHDONNA MARLENY BACHSIN, S.E., M.M.
12. H. GUNTUR SASONO, M.Si.
13. VIVI SUMANTRI JAYABAYA, S.Sos.
14. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR, S.P.
15. Drs. H. UMAR ARSAL
16. H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si.
17. H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si.
18. Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.
19. Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si.
20. H. ASEP AHMAD MOUSHUL AFFANMDY
21. Drs. H. HASANUDDIN, AS, M.Si.
22. SULAEMAN L. HAMZAH
23. Drs. MUCHTAR LUTHFI A. MUTTY, M.Si.
24. LALU GEDE SYAMSUL MUJAHIDI, S.E.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A./F-GERINDRA):

Bu Menteri bisa kita mulai.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Ohm suastiastu.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Yang terhormat Saudari Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya.

Yang terhormat Saudara Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia.

Yang terhormat Saudara Direktur Utama PT Garam.

**Yang terhormat Saudara Direktur Utama PT Perikanan Nusantara, serta
Hadirin yang kami hormati.**

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat wal 'afiat guna menjalankan tugas dan fungsi DPR RI. Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019 yang telah diputuskan dalam rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi tanggal 11 Desember 2018 dan Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 8 Januari 2019 pada hari ini Senin 21 Januari 2019, Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2018, rencana pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2019, temuan hasil kunjungan kerja Reses dan isu-isu penting lainnya.

Sebelum kami lanjutkan perkenankan kami memperkenalkan Anggota baru Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Saudara Drs. H. Hasanuddin, AS daerah pemilihan Sumatera Barat I dari Fraksi PPP.

Kami persilakan singkat saja Pak, Dapilnya.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan yan kami muliakan, Bu Menteri dan jajarannya.

Saya Drs. H. Hasanuddin Abdul Samah, M.Si Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bergabung dengan Komisi IV, Dapil Sumbar I 11 kabupaten kota.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Dan dari Fraksi Partai Hanura Saudara DR. Erislan, ST., MM Nomor Anggota 551 daerah pemilihan Jabar II.

Kami persilakan.

F-HANURA (Dr. ERISLAN, S.T., M.M.):

Terima kasih.

Pimpinan yang saya hormati dan Ibu Menteri serta jajarannya.

Perkenalkan nama saya DR. Erislan, ST., MM Fraksi Partai Hanura Dapil Jawa Barat II meliputi kabupaten Bandung dan Bandung Barat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi IV DPR-RI telah hadir 28 Anggota dari 489 Anggota Komisi IV DPR RI dari 10 Fraksi. Sesuai ketentuan Pasal 246 dan Pasal 251 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 15.20 WIB)

Sesuai undangan Rapat Kerja pada hari ini harusnya dimulai pukul 14.00 WIB, namun karena beberapa hal baru bisa kita mulai pukul 15.15 WIB dan kita berharap pukul 16.00 WIB sudah selesai. Namun apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 226 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI atau sesuai keputusan bersama dengan acara rapat sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;

2. Penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai evaluasi pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2018, rencana pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2019, temuan hasil kunjungan kerja Reses dan isu-isu penting;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV;
4. Jawaban atas tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
5. Kesimpulan;
6. Penutup.

Apakah acara tersebut dapat disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Dalam rangka mengevaluasi program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi IV DPR RI meminta penjelasan dan langkah tindak lanjut dari realisasi penyerapan anggaran tahun 2018 karena hanya sebesar 79,89% atau sebesar 6,09 triliun dari pagu anggaran 7,63 triliun. Kemudian penjelasan mengenai rencana program dan kegiatan dengan postur anggaran tahun 2019 sebesar 5,48 triliun.

Pada kesempatan ini Komisi IV DPR RI juga meminta penjelasan terkait dengan temuan hasil kunjungan kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019 di Provinsi Bali, Jawa Tengah dan Sumatera Selatan. Selain itu Komisi IV DPR RI juga meminta penjelasan terkait isu-isu penting terkini lainnya:

1. Terdapatnya beberapa bantuan pemerintah alokasi anggaran tahun 2018 yang belum selesai direalisasikan atau disalurkan ke masyarakat pelaku utama kelautan, perikanan hingga akhir tahun 2018. Lalu bagaimana mekanisme dan teknis mengenai bantuan pemerintah bidang kelautan dan perikanan untuk tahun 2019.
2. Program prioritas sentra kelautan perikanan terpadu SKPT Kementerian Kelautan dan Perikanan yang hingga saat ini belum atau tidak beroperasi secara baik akibat sarana dan pra sarana yang belum siap, sehingga akhir masa jabatan menteri berindikasi tidak selesai dengan target, khususnya di daerah-daerah pinggiran perbatasan dan daerah terluar sebanyak 20 titik SKPT.
3. Adanya gejala deindustrialisasi perikanan dalam arti matinya sejumlah Industri perikanan akibat adanya kekurangan pasokan ikan. Contoh kasus di daerah Belitung, Sumatra Utara sebagaimana solusinya.

Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan, Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Demikianlah pengantar yang kami sampaikan, selanjutnya sesuai dengan acara yang telah kita sepakati kami persilakan Saudari Menteri untuk menyampaikan penjelasannya.

Kami persilakan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (SUSI PUDJIASTUTI):

Assalammu'ailakum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Bapak Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang memberikan rahmat-Nya dan karunia kepada kita semua, sehingga pada hari ini dapat melakukan Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI yang pertama di tahun 2019, dengan agenda evaluasi pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2018, rencana pelaksanaan anggaran 2019, temuan hasil Kunker Masa Reses dan isu-isu penting.

Evaluasi pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2018.

Pak Ketua, Wakil Ketua dan paara Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Kami ucapkan terima kasih atas dukungan Komisi IV DPR RI dalam pelaksanaan program Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai akhir tahun 2018 yang capaiannya dapat kami laporkan sebagai berikut:

1. Nilai PDB Perikanan mengalami kenaikan dari 57,84 trilyun, ada triwulan III tahun 2017 menjadi 59,98 trilyun pada triwulan III tahun 2018. Dengan pertumbuhan year on year sebesar 3,71%.
2. Produksi perikanan tangkap laut pada Januari-September 2018 telah mencapai 4,95 juta ton atau naik 4,19% dibanding dengan periode yang sama tahun 2017.
3. Produksi ikan, udang hasil budidaya Januari-September telah mencapai 5,48 juta ton atau naik 26,61% dibandingkan periode yang sama Januari-September 2017. Dengan peningkatan terbesar pada budidaya ikan air tawar lele, gurame, patin dan nila sedangkan produksi rumput laut pada Januari-September 2018 telah mencapai 7,8 juta ton.
4. Capaian angka konsumsi ikan tahun 2018 naik menjadi 50,69 kg per kapita lebih dari pada harapan di mana tahun 2018 rencana kenaikan hanya mencapai 46 kg per kapita.
5. Hasil ekspor perikanan Januari-November 2018 telah mencapai 4,45 milyar yang di prediksi sampai dengan akhir tahun dapat mencapai 4,89 milyar. Nilai neraca perdagangan hasil perikanan periode yang sama mengalami surplus 404 milyar US Dolar, nilai ekspor terbesar komoditi udang mencapai 1,62 milyar dengan tujuan utama ke Amerika Serikat.

6. PNBP perikanan mencapai 645 milyar sedangkan penerimaan pajak sektor perikanan tercatat 1,82 trilyun yang merupakan capaian tertinggi dari pada 10 tahun terakhir.
7. Realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan sampai dengan September 2018 mencapai 3,4 trilyun.
8. Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan dapat disampaikan yang melalui perbankan 2018 mencapai 30,31 trilyun yang disalurkan kepada 350.358 debitur dengan tingkat MPL rendah 1,93%. Pembiayaan non bank mencapai 392,10 milyar, pembiayaan melalui kredit usaha rakyat Sseptember 2018 mencapai 2,52 trilyun untuk 112.621 debitur, pembiayaan melalui lembaga pengelolaan modal usaha kelautan dan perikanan melalui badan layanan umum Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyalurkan dana 333,41 milyar untuk 14.002 penerima manfaat di 210 kabupaten kota.
9. Nilai tukar rata-rata mengalami kenaikan di mana tahun 2018 nilai tukar nelayan mencapai 113,28 sedangkan nilai tukar usaha perikanan mencapai 126,68, demikian juga untuk budidaya mencapai 100,8 NMTUPI mencapai 113,27 artinya nilai tukar dari pada kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan terus semakin meningkat.
10. Capaian luas kawasan konservasi perairan telah melampaui target yaitu sampai 2018 mencapai 20,87 juta hektar.
11. Jumlah kapal ilegal yang ditangkap 2018 sebanyak 109 dan telah diproses lebih lanjut, sedangkan jumlah kapal yang telah ditenggelamkan sampai akhir 2018 adalah 488 kapal.
12. Penanganan pelanggaran karantina berhasil menggagalkan 543 kasus penyelundupan sumber daya ikan yang mencapai nilai 403 milyar, sebanyak 14 peraturan daerah terkait zonasi, pesisir, pulau-pulau kecil telah diselesaikan yaitu Maluku, Maluku Utara, Sulut, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Kaltara, Kalsel, NTT, NTB, Jatim, DIY, Lampung dan Sumbar.
13. Peningkatan kapasitas SDM meningkatkan kelas bagi kelompok yang disuluh 5.352 penyuluh perikanan, 16.500 masyarakat telah dilatih, 6.500 sertifikat kompetensi diterbitkan, dibangun 2 politeknik KP yang dihasilkan 1.862 lulusan siap diserap dunia usaha dan afirmasi untuk anak pelaku utama diterima sebagai peserta didik dengan beasiswa lebih dari 40%. Bidang riset diselesaikan, kajian stok akses dan 5 perairan umum dan daratan, pembangunan laboratorium ikan hias dan genetika ikan dan 21 riset kelautan, 23 inovasi teknologi, 43 kebijakan rekomendasi.

APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2018 dari pagu 7,6 trilyun terealisasi 6,1 atau 79,89% digunakan untuk melaksanakan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bantuan pemerintah telah direalisasikan beberapa unit kerja Eselon I sebagaimana terinci dalam bahan dan slide yang telah kami serahkan.

Tahun 2018 sebanyak 12 SKPT sudah siap di operasionalkan yaitu Natuna, Nunukan, Biak, Numpor laut, Murotai, Mentawai, Merauke, Mimika, Sabang, Rote, Ndaus, Sumba Timur dan Samlaki. Namun demikian beberapa tempat masih diperlukan sarana pra sarana untuk pengembangan SKPT yang akan terus kami koordinasikan dengan pemerintah daerah kementerian terkait lainnya.

Sebagai contoh SKPT yang telah operasional penuh adalah Natuna, Merauke di mana telah terjadi lalu lintas ikan domestik baik secara volume maupun nilai pada setiap tahun.

Bapak Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI.

Kami berterima kasih dengan disetujuinya pagu alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019 sebesar 5,48 trilyun, terdiri dari rupiah murni 5,28 dan PNBP sebesar 203 milyar. Alokasi anggaran 2019 akan digunakan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk program prioritas.

1. Pengelolaan perikanan tangkap diperuntukkan untuk 300 unit kapal di bawah 5 GT, 1 unit kapal perikanan 60 GT, 2000 unit bantuan alat penangkapan ikan, 170 ribu premi asuransi, 20 ribu asuransi mandiri, 15 ribu bidang fasilitas sertifikat hak atas tanah nelayan dan operasionalisasi SKPT di 4 lokasi.
2. Program pengelolaan budidaya untuk 215 juta ekor bantuan benih dan calon induk, 80 paket kebun bibit rumput laut kultur jaringan, 20 unit ekskavator, 250 bioflok, 400 paket mina padi, 55 paket mesin, 5 ribu hektar asuransi budidaya, operasional SKPT di 3 lokasi.
3. Pengelolaan ruang laut diperuntukkan antara lain 5 lokasi dermaga apung, 1000 hektar pemberdayaan usaha garam rakyat, 700 ribu hektar pencadangan kawasan konservasi perairan, 36 rencana zonasi, 20 paket kelompok masyarakat penggerak konservasi, sertifikasi 20 pulau terluar dan operasionalisasi SKPT di 4 lokasi.
4. Program penguatan daya saing produk kelautan diperuntukkan antara lain 8 unit ice....., 70 unit ice....1,5 ton, 45 paket gemar makan ikan, pembangunan 1 unit pasar ikan modern, 300 unit sarana sistem rantai dingin, 28 unit kendaraan berpendingin dan operasionalisasi SKPT di 2 lokasi.
5. Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, diperuntukkan antara lain 84 hari operasional kapal pengawas dan operasional pesawat patroli, 30 hari operasional speedboat, operasional awak kapal pengawas sebanyak 502 orang, supervisi dan operasional pengawasan 1.870 pelaku usaha, operasional dan pembinaan Pokwasmas 1.010 kelompok dan Satgas 115.
6. Program riset budidaya sumber daya manusia dan kelautan dan perikanan, antara lain 8.243 peserta didik, 18.800 peserta pelatihan, 3.500 sertifikasi kompetensi, 5.252 tenaga penyuluh, kajian stok sumber daya

ikan di 11 WTP, 6 PUD, 35 paket kajian, 7 inovasi teknologi, 2 lokasi Sarplas pusat riset kelautan.

7. Program karantina pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus pelanggaran dan pengkarantinaan di 46 Satker 10 lokasi Sarplas, operasional pengawasan mutu produk di 34 provinsi, pengujian mutu di 39 lokasi, pengawasan di 30 lokasi.

Selanjutnya ditargetkan di triwulan I tahun 2019 bantuan pemerintah Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa didistribusikan kepada stakeholder Kementerian Kelautan dan Perikanan di mana proses identifikasi dan pengumpulan datasedang kami lakukan, untuk selanjutnya proses verifikasi calon penerima akan sudah bisa dimulai pada awal Februari 2019.

Tindaklanjut hasil Kunker Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan, Jateng dan Bali, antara lain:

- Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2018 telah membangun PPI Perairan Umum Daratan di kabupaten Musi Banyuasin. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan pemerintah daerah untuk meningkatkan sarana pelabuhan dan optimalisasi dana alokasi khusus provinsi di kabupaten Banyuasin.
- Provinsi Jateng, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengoptimalkan fungsi pelayanan karantina ikan kelas II Tanjungmas Semarang dengan peningkatan SDM sarana dan pendukung dan anggaran operasional.
- Provinsi Bali, terus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang kapal penangkap ikan, kapal penyangga dalam kesatuan operasi penangkapan ikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Dirjen Tangkap Nomor 1/2016. Disamping itu Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan sosialisasi bahwa terumbu karang merupakan habitat penting sumber daya ikan spawning ground, nursery ground, fishing groundk pelindung pantai dari hempasan ombak dan menjadi salah satu objek pariwisata. Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku manajemen authority konservasi sumber daya ikan berkewajiban untuk memastikan pemanfaatan biota perairan yang berkelanjutan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong Anggota asosiasi koral ikan hias agar lebih fokus melanjutkan perdagangan ikan hias mengingat 92,8% dari nilai komoditas utama yang diperdagangkan adalah ikan hias. Merupakan nilai perdagangan ikan hias yang paling tinggi.

Isu-isu penting.

Bapak Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Terkait isu penting perizinan kami laporkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan review perizinan usaha penangkapan ikan dan hasilnya masih ditemui adanya kelemahan dalam pengisian LKU LKP. Di mana para pelaku usaha pemegang CV di atas 30 BGT selama ini melaporkan hasil tangkapannya selalu jauh di bawah hasil tangkapan yang sesungguhnya. Sehingga dampaknya negara mengalami kerugian dari pemanfaatan SBI dan penerimaan negara pun sangat rendah. Dari hasil review diperoleh data pelaporan ikan sebesar 459 ribu ton merupakan selisih antara data awal dan data perbaikan setelah adanya keharusan perbaikan laporan hasil tangkapan, sampai 16 Januari telah diterbitkan 4.436 SIUP, 4.103 CV dan 285 CV. Apabila dilihat sebaran kapal perikanan menurut WTP jumlah izin kapal yang diberikan sebanyak di WTP 718 sudah sebanyak 1.406. dalam 3 tahun terakhir ini juga tambahan belum dimasukkan sudah terjadi pembangunan kapal baru dengan ukuran di atas 30 GT hampir mencapai 2.500 kapal.

Bapak Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, sementara untuk Bitung saya mungkin mau kasih tambahan sedikit Pak Ketua, bahwa dari data yang kita dapat di Bitung itu justru dalam 2 bulan ini terdapat surplus produk yang luar biasa. Kemudian bisa dilihat di sini dari laporan di lapangan karena adanya berita tentang 4 pabrik akan ditutup, nah dari informasi ini itu tidak benar, itu adalah data lama. Sementara saat ini ikan cakalang dan tuna melimpah besar, Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa kroscek di Bitung itu ada beberapa sms yang bisa saya kasih lihat dan di sini juga disampaikan mohon maaf saya mau konfirmasi terkait di koran Kompas PT Delta sudah tutup sejak bulan Agustus, itu keliru. Pak Hatta justru k kita mulai produksi kembali sejak Agustus sampai sekarang, itu sms yang datang dari PT Delta. Dan alhamdulillah produksi kita naik rata-rata sekitar 50 metrik ton per hari, jadi antara berita dan realita tidak sama. Kemudian saya tanya juga New Delta sekarang beroperasi Bu, per hari mencapai 50 ton. PT Delta justru paling tinggi pasokan ikannya, itu adalah beberapa dari pada wawancara kita di lapangan dan memang di PPI pun sangat banyak.

Data dari pada BKIPM juga ekspor Sulut tahun 2018 naik 800% dibanding tahun 2017, ekspornya Pak yang melewati udara ya. Begitu juga dengan Sumatera Utara, jadi dalam beberapa bulan terakhir memang ada pengkondisian dari pada para pelaku yang terkena kebijakan moratorium kapal-kapal asing untuk menginginkan kapala-kapal mereka kembali beroperasi dengan membawa beberapa isu yang dibuat-buat tidak benar. Dari data ekspor itu semua Bitung, Sulut, kemudian Sumatera Utara juga justru meningkat Pak. tapi memang ada PT yang tutup yaitu PT yang selama ini memang tidak pernah buka. Seperti misalnya Arde Pasifik, Arde Pasifik itu mulai dibangun tahun 2005 sampai 2014 saya menjadi menteri itu tidak pernah buka, mereka hanya bikin pabrik supaya diabisa kapal asing yang dari Filipina itu nangkep ikan di Indonesia. Jadi memang mereka tutup, tapi saya menghidupkan dengan menutup 4 perusahaan, saya menghidupkan 54 prosesor

baru Pak di sana yang keuntungannya luar biasa. Jadi Bitung yang dulu selalu impor ikan, sebetulnya juga itu ikan kita yang ditangkap oleh kapal Filipina, yang gedonya di proses di Jentan, yang jeleknya grade II dibawa ke Bitung untuk dikalengkan, sekarang tidak ada itu. Yang bagus di ekspor pake pesawat karena sekarang ikannya besar-besar cakalangnya.

Kembali saya ingin menjelaskan di sini Industri yang dimaksud itu Industri yang seperti apa Pak, kalau Industri perikanan yang benar yang harus kita tuju adalah Industri yang bernilai value tinggi adalah yang segar yang mahal. Kalau kaleng itu keinginan saya satu hari tidak ada lagi ikan kaleng Pak karena itu ikan value-nya rendah. Eksploitasi sumber dayanya juga sudah luar biasa Pak, sekarang ini pure sign itu tangkapannya luar biasa, tapi 60-70 itu baby tuna. Yang semestinya kalau itu tidak ditangkap bisa besar jadi 100 kg, 50 kg yang value-nya bisa ribuan dolar, bisa satu harga mobil Pak kalau baby tuna yang 3 kg tidak di tangkap pure sign dia menjadi ukuran 90 atau 100 bahkan 200 kg itu harganya bisa 200 juta 1 ekor. Jadi kita semua harus sudah mulai merubah paradigma sebab pengalengan ikan itu adalah Industri jaman kereta dulu lah Pak Ketua. Jadi yang kita tuju sekarang ikan beku, ikan segar, nah ikan segar ini membutuhkan dukungan penuh dari infrastruktur logistik Pak, terutama penerbangan. Saya ingin juga Komisi IV bisa membantu kami untuk supaya penerbangan dari luar, dari wilayah-wilayah terluar Indonesia ada yang keluar negeri langsung supaya ikan-ikan tuna kita juga bisa berharga lebih mahal.

Kalau yang utara sudah lumayan trayek ke luar negeri, tapi yang selatan belum. Jadi kalau itu bisa ditingkatkan ikan-ikan yang ada di Kupang misalkan, di Moa, itu sekarang nelayan mancing dapat ikan 70-90 kg per ekor Pak, sehari mereka bisa dapet 2-5 ekor. Sekarang ini mereka tidak bisa diterbangkan karena tidak bisa sashimi first grade karena tidak bisa diterbangkan karena penerbangan dari Kupang-Darwin belum ada, adanya dari Dili tapi kemarin ada nelayan kita yang masuk ke Dili ditangkap oleh pemerintah Timor Leste yang mau jual langsung. Jadi kenapa kita tidak buka penerbangan Merauke ke Cannes, Merauke ke Darwin lebih dekat dari pada ke Jakarta. Logistik Indonesia saat sekarang ini untuk perikanan ini sangat tidak baik Pak, karena ikan mahal semua jadi turun harganya. Dari Murotai mestinya bisa langsung ke Davos, ke Cehu, ke Censan atau juga ke Jepang supaya value-nya tinggi karena sekarang yang di dapat oleh para nelayan ini adalah tuna dengan ukuran besar-besar. Di Hindian Ocean karena bannyak pure sign jadi tuna tertangkap, tapi kita harus bangga bahwa akhirnya Indonesia ini satu-satunya negara yang berhasil memulihkan dan melipatgandakan penangkapan tuna Pak, dibandingkan negara-negara lain dan itu diakui oleh dunia. Sekarang sudah mencapai 16% dari total tuna dunia Pak di pasar, itu kenaikan yang luar biasa dalam 4 tahun ini.

Jadi isu Bitung itu hanya isu yang dikondisikan yang dibuat-buat, Sumut juga sama. Jadi saya menginginkan Bapak Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI

untuk bisa memfilter atau melihat secara langsung isu-isu ini kebenaran dan apa yang terjadi di lapangan. Kira-kira seperti itu Pak Ketua dan beberapa perizinan sebenarnya kemarin bukan kita persulit tapi saya memang mengharuskan semua pengusaha untuk melaporkan laporan yang sebenar-benarnya karena banyak pure sign ukuran 170 GT, 150 GT tangkapannya 2 ribu ton setahun, laporannya Cuma 20 ton, terus diperbaiki jadi 200 ton, perbaiki lagi jadi 600 ton, tidak saya kasih lagi baru naik jadi 1.500 ton, makanya pajaknya juga sekarang alhamdulillah naik Pak, karena ekspor kan tidak ada pajak, jadi mestinya mereka harus mulai jujur karena kalau tidak angka hasil penangkapan kita juga tidak kelihatan. Jadi sebetulnya kalau report dan regulated-nya sudah benar angka 4 juta itu mungkin masih tambah 40-60% lagi Pak, yang sebenarnya. Jadi sebenarnya kenaikan PDB perikanan itu kalau dihitung riil yang sebenarnya itu mungkin lebih 40-60% ya dan itu sudah di kalau data BKIPM dan data PEB sekarang sudah mulai disinkronkan karena kita mendapatkan data ekspor BKIPM itu berbeda 20% lebih tinggi dibandingkan data bea cukai Pak, kenapa? Karena pengusaha membuat invoice-nya under value. Tapi kalau ke BKIPM jujur karena held certificate. Held certificate kaitannya dengan a fright and insurance, kalau ada apa-apa mereka takut tidak dibayar jumlah yang sebenarnya. Jadi kalau ke kami laporannya jujur, kalau ke sana laporannya dikecilkan. Nah data ini sudah disinkronkan sehingga bea cukai pun nanti akan memperbaiki, jadi nanti tahun depan pasti angkanya akan melonjak lebih tinggi lagi.

Jadi perbaikan-perbaikan dalam manajemen pencatatan, manajemen pendataan terus kita perbaiki Pak. Tapi dari data yang sekarang apa adanya saja peningkatan itu sudah sangat signifikan dan bukan hanya tuna, saya pikir sekarang udang pun kita sudah nomor 2 di Amerika Serikat dan dengan pembebasan tarif yang kita dapat tahun 2015 itu pengusaha Indonesia diuntungkan hampir 400 juta dolar lebih setiap tahunnya di Amerika. Itu juga karena Amerika me-reward dengan perang kita melawan ilegal underreported and regulated fishing.

Kira-kira seperti itu Bapak Ketua dan Wakil Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Bapak-Ibu sekalian.

Kalau tidak ada yang bertanya langsung ke kesimpulan, oh Bu Endang.

Silakan Bu Endang.

F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H., M.Hum.):

Terima kasih Pak Ketua.

Kalau saya tanyakan sebentar saja, terima kasih.

**Yang saya hormati Bu Susi dan jajarannya, singkat saja.
Yang saya hormati kawan-kawan Komisi IV.**

Singkat saja saya di daerah saya Dapil saya Boyolali, Klaten, Solo dan Sukoharjo, saya dengan Bu Endang Srikarti Handayani Fraksi Golkar. Di tempat saya tidak ada laut, tetapi pada saat saya berkunjung ke daerah Juana Semarang, ini hanya titipan saja untuk disampaikan kepada Bu Menteri. Pada saat ada tangkap ikan hasil, izin hasil tangkap ikan untuk dikirimkan ke tujuan itu tidak cepat di respon izinnya, sehingga banyak sekali di sana itu lama. Jadi ini saran saya karena saya juga lihat ke sana saran saya jemput bola supaya hasil tangkap ikan untuk dibawa ke tempat tujuan itu segera bisa terselesaikan, itu saja. Ini titipan di Juana Semarang daerah Semarang itu bagus sekali ternyata, luar biasa, ternyata kita ini punya kekayaan ikan yang luar biasa.

Terus yang kedua Bu Susi di daerah saya itu di Dapil saya, saya menyuatkan Dapil saya Boyolali, Klaten, Solo dan Sukoharjo itu kan tidak ada kelautan hanya budidaya ikan, nggak seberapa. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Dirjen, semoga ini bisa diselesaikan Pak Dirjen. Terima kasih Bu, saya dari Fraksi Golkar selalu mendukung apa yang di kebijakan dengan Bu Menteri Susi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Bapak-Ibu sekalian.

Pak Hermanto silakan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua. Yang baik hati.

Pimpinan yang terhormat, Anggota dan Bu Menteri bersama jajarannya.

Pak Dirjen senyu-senyum semua berarti ada tanda-tanda kebahagiaan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pertama tentu kami menyampaikan apa ya semacam mungkin bisa juga bentuknya masukan karena kami melihat dan merasa bahwa ada semacam tanggung jawab kolektif-kolegial Anggota DPR RI bersama mitranya, terutama terkait dengan yang periode ini kita rapat kurang begitu menggembirakan karena berapa kali kita mengadakan rapat ini sepertinya Bu Menteri mungkin ada halangan Bu Menteri ya sehingga tidak dapat ada statement-statement langsung dari Bu Menteri terutama terkait soal kinerja-kinerja anggaran karena kami mendapatkan informasi bahwa anggaran kementerian itu mendapatkan suatu kondisi keuangan yang apa istilahnya itu WDP kali ya. Lalu kami juga ingin tentunya sebagai Anggota DPR RI, sebagai kolektif-kolegial kita dalam bermitra tentunya kita juga ingin mendapatkan penjelasan ini. Ini mohon kami minta penjelasan.

Kemudian yang kedua, musim ini pun juga kami tidak begitu melihat seperti apa program-program yang dilaksanakan berbasis kepada masyarakat. Ini kami kadang-kadang mendapat komplain dari para nelayan, para gitu kan ini kok program-program untuk meningkatkan produktivitas nelayan ini sangat kurang. Yang kami dengar itu hanya lebih pada program-program untuk besar-besarnya saja. Sementara nelayan dan yang sebenarnya lebih menumbuhkan ekonomi masyarakat. Ini sepertinya belum begitu greget bahkan cenderung nelayan dan ini semua sektor yang berkaitan dengan berbasis masyarakat itu menyampaikan keluhan-keluhannya, kenapa kok program ini susah dapetnya. Nah kemudian tentunya kita menyusun program ini kan untuk berorientasi pada memperbaiki ekonomi masyarakat, terutama nelayan dan Tentunya kita berharap seluruh anggaran yang dibangun untuk 2019 ada perbaikan lah untuk keberpihakannya kepada perbaikan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Saya pikir ini 2018 pelajaran yang sangat berarti buat kita, ada hal yang bisa kita perbaiki untuk 2019 kita perbaiki. Saya mengapresiasi ini ada beberapa program, ada perikanan tangkap, ada pengolahan ruang laut, ada perikanan budidaya, penguatan daya saing. Ini tentunya kami ini apresiasi, program ini bagus semua tapi bagaimana Anggota DPR RI itu bisa melakukan pengawasan terhadap ini, ini lah yang menjadi problem 2018 kemarin. Sedangkan kami Anggota DPR RI itu semacam ya bisa dianggap sebagai tidak efektif lah untuk mengawasi program-program yang berbasis masyarakat. Ini lantaran memang programnya tidak terkomunikasikan dengan baik, oleh karena itu saya melihat kalau program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019 ini kita kelola dengan lebih baik dan kita bisa memperbaiki kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih baik ke depannya, saya pikir ini memang perlu ada koordinasi dan kemitraan yang baik, terutama program-program yang berbasis masyarakat karena anggaran ini kan kita buat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat nelayan. Jadi kami ingin memastikan program-program seperti ini misalnya perikanan budidaya, kemudian alat tangkap ikan segala macamnya ini harus ada schedule yang jelas lah, apakah misalnya akan di alokasikan di awal tahun atau pertengahan tahun atau seperti apa, tapi memandang program-program ini lebih cepat lebih baik, terutama program-program yang berbasis masyarakat kalau bisa di awal Pak Ketua karena ini sangat

penting buat memperbaiki ekonomi nelayan yang 2018 kemarin itu kurang greget untuk menumbuhkan perekonomian ini, kita perbaiki di awal tahun ini, begitu Bu Menteri ya supaya ini bisa lah kita bersinergi di lapangan seperti apa, seperti Bu Menteri ketika menjabat pada awal-awal periode itu kan sangat greget sekali ya. Di akhir ini, kita di akhir nih Bu Menteri iya kan setidaknya-tidaknya ada sesuatu yang bisa kita kenang melihat Bu Susi yang selalu senyum terus.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Supaya jangan terjadi kesalahfahaman ini bisa karena ini di ruang publik jadi bahasan yang jadi negatif nanti, maksud Beliau maksudnya adalah kan pembagian kelompok-kelompok yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan selama ini sudah pernah berjalan dan baik, kita di teman-teman di DPR RI ini memberikan kemudahan karena kita punya akses kelompok-kelompok itu, sebagian sudah ada yang berjalan, sebagian masih ada yang mandek, nah ini tolong dipermudah, tolong dipercepat tanpa merusak tatanan yang ada. Sebagai misal ada yang memang harus melalui badan hukum, badan hukum ini dalam Kementerian Pertanian ini bisa disiasati supaya tidak merusak aturannya, yang penting bahwa aturannya jelas. Ibu punya kelompok nelayan, yang penting kelompoknya ini benar ada usahanya, ada kegiatannya. Nah ini bagaimana jalan keluarnya, inikan kita atas nama konstituen di daerah pemilihan masing-masing yang selama ini sudah menjanjikan sesuai dengan janji dari kementerian, ini yang kita minta untuk direalisasikan, bukan hadiah-hadiah yang di ujung sebagainya, bukan yang itu yang lain-lain. Intinya adalah kepentingan masyarakat yang pernah kita usulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagian sudah berjalan dan sebagian belum berjalan, ini tolong segera dilaksanakan. Bagi yang di 2019 kalau bisa kita minta direalisasikan di bawah bulan Maret ini, saya pikir bukan hal yang sulit dan intinya itu Bu Sus, saya pikir ini teman-teman ya, ada tambahan, ngapain kita ngomong tedeng aling-aling toh ujungnya juga untuk kepentingan masyarakat yang kita bina.

Oke, Bapak-Ibu sekalian.

Kalau tidak ada kita langsung kepada kesimpulan, silakan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Ketua, mungkin sedikit tadi saya sudah sebutkan Februari kita maunya sudah selesai untuk pengalokasian dan lain-lain. Tadi kan sudah saya sebut tadi Bu, terima kasih. Saya dari dulu juga seperti itu Pak, sama Pak, tidak pernah berubah saya, DPR-nya saja yang melihatnya berubah barangkali, saya sama Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-HANURA (Dr. ERISLAN, S.T., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Bu Menteri beserta jajarannya.

Saya mencoba membaca data yang datang ke saya ya, jadi di sini dikatakan bahwa PDB-nya melambat. Kalau hitung PDB itu kan dia dari tahun, dari 5 tahun ke belakang, kemudian coba di konfrontir tapi katanya pendapatannya naik gitu kan. Jadi inikan aneh saya benar, eh saya salah tapi saya benar seolah-olah gitu pandangan saya. Jadi PDB-nya melambat 3% gitu kan, katanya PDB perikanan triwulan III mengalami pelambatan 3%, yang baik itu di atas 5%, tapi katanya bahwa pendapatannya naik secara rupiah, itu satu.

Yang kedua, bahwa Indonesia inikan negara produksi ikan terbesar di dunia ya Bu, tapi saya lihat ini tidak berbanding lurus dengna PDB yang dihasilkan dari kapasitas produksi kita gitu ya. Ini yang menjadi pertanyaan juga seharusnya dengan kapasitas produksi yang besar berimbas atau berimplikasi pada pendapatan negara yang besar juga dari sektor perikanan ini, itu yang kedua.

Yang ketiga, tadi disampaikan memang pemahaman saya nelayan bagi saya sebagai wakil rakyat itu adalah nelayan yang ada di kampung nelayan, bukan mereka pengeksport-engeksport yang mohon maaf ini pengusaha-pengusaha besar. Jadi tolong programnya juga ke arah sana jadi memang ini benar-benar negara itu hadir bagi rakyat Bu.

Selanjutnya juga bahwa pertanyaan saya ketika Ibu menenggelamkan kapal-kapal luar negeri, apakah ini tidak berimplikasi pada hubungan antara negara kita dengan luar negeri itu, ketika khususnya misalnya kita akan mengeksport ikan ke negara tersebut.

Itu saja Bu, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bapak mau bicara, kok tangan Bapak begini-begini.

Silakan.

F-NASDEM (Drs. FADHOLI):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Ketua dan Anggota yang saya hormati.

Saya hanya akan menyampaikan masukan Dapil Bu, jadi saya akan cerita saja ketika dulu Pak Syarif menjadi Dirjen Tangkap pernah ke Kendal dan waktu itu ke daerah Lentengan Pak dan juga ke Mangunharjo yang disambut dengan gegap gempita pada saat masih ada masalah-masalah apa itu...., tetapi itu sudah bisa clear diredakan oleh Pak Syarif dan waktu itu juga ada usulan dari warga dan direspon positif oleh Pak Syarif. Yang pertama masalah ekskavator yang dijanjikan tapi sampai sekarang belum kunjung datang. Kemudian yang kedua di Tawang itu, yang belum masalah ini Pak PPI tempat penerima ikan itu Pak yang di Bantengan. Nah ini kalau saya ke sana kan ditagih-tagih terus itu, ini hanya sekedar mengingatkan saja. Kalau masih memungkinkan untuk di mungkin, kalau itu kan pasti tidak mungkin sebelum pemilu, tetapi kalau memang itu bisa dimungkinkan kan saya masih bicara pasti akan dibangun, tapi kalau memang sudah tidak ada anggarannya nanti kita nggak enak gitu, di Kendal Bu, kabupaten Kendal satu, kemudian yang satu di Mangunharjo kota Semarang. Itu nelayan yang sangat terpencil sekali, kemarin saya dikasih kepiting yang di dapur situ, tetapi itu yang saya hanya 2 lokasi itu saja, biar saya ada kepastian ketika saya datang lagi, oh iya ini lagi diprogramkan atau tidak diprogramkan.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Silakan Pak.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan yang terhormat.

Bu Menteri yang kami banggakan.

Ini juga dari Dapil Cuma 2 saja, satu masalah biofirm untuk pesantren. Kebetulan Dapil I Sumatera Barat itu banyak pesantren, Sumatera Barat itu Dapil I itu 11 kabupaten kota mulai dari kota Padang, Pesisir Selatan nanti akhirnya ke ...

saya, laut Cuma satu di pesisir selatan itu Mentawai. Tapi yang kami minta bukan itu tapi untuk pesantren, lele untuk pesantren. Kalau pesantren banyak sekali Bu, tapi minta 5 saja lah cukup.

Yang kedua, ada satu jenis ikan di dunia ini satu-satunya di daerah situ namanya ikan bilih adanya di danau Singkarak. Satu-satunya ada di dunia adanya di danau Singkarak namanya ikan bilih. Akhir-akhir ini danau Singkarak itu tercemar oleh kerambah, jadi saya sudah bicara sama Ibu Susi jangan diberhentikan mereka tapi dicarikan jalan keluarnya. Kebetulan Perda memang sudah memberhentikan kerambah itu api saya inspirasi dari Ibu nanti akan saya temui Pemdanya jangan diberhentikan, tapi dicarikan jalan keluarnya. Waktu kami berdialog dengan nelayan mereka akan kembali berbiduk, biduk itu artinya perahu kecil, mereka minta itu saja sama supaya tidak didayung sama mesin tempel. Jadi itu jalan keluarnya, mereka kembali ke nelayan tradisional tapi kalau bisa dibantu juga dengan mesin tempel yang kecil saja supaya tidak pakai tangan. Mudah-mudahan Bu Menteri bisa membantu kami di Dapil dan mudah-mudahan kami juga bisa terpilih kembali untuk periode yang berikutnya.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Itu ganti biofolk saja Pak, yang di danau Singkarak tadi ganti biofolk biar di darat.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Ketua, kita juga sudah memang program ikan bilih beberapa spesies asli. Itu kita kejar untuk artificial breeding, seperti belida kita juga sudah pelepasan liar di Sumsel. Kemudian ikan celawat dari Kalimantan juga kita sudah, nah ikan bilih sudah kita lakukan dan kita akan tabur nanti Pak di Meninjau sama Singkarak. Namun seperti tadi bukan dikasih jalan keluar maksud saya Pak, tapi diatur dibatasi. Nah ini harus disiplin kalau pemda tidak bisa membatasi nanti eksekusi lagi dan menjadi rusak lagi, jadi di atur dibatasi, boleh tapi diatur dibatasi. Orang kita biasanya alergi sama peraturan pembatasan, padahal kadang-kadang kalau sumber daya alam itu kita batasi, kita atur itu justru lebih produktif tapi ya itu tadi sosialisasi kadang-kadang memerlukan waktu dan pemda biasanya tidak suka dibawah disiplin Pak. Itu barangkali juga kerja pemerintah daerah yang kita perlukan.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, Ibu Kasriyah mau menyerahkan apa tadi, silakan.

F-PPP (Hj. KASRIYAH):

Izin Pak Ketua, ini amanah dari masyarakat Kalimantan Timur untuk usulan-usulan jadi saya izin untuk diserahkan kepada Bu Menteri Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, sama Pak Budi sekalian, silakan Bu Kasriyah.

Baik, Bapak-Ibu sekalian.

Bu Susi masih mau menambahkan tanggapan-tanggapan, masukan-masukan dari teman-teman Komisi IV tadi.

Silakan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Sedikit saja mungkin Pak, 5 menit saja.

Untuk PDB memang kalau dilihat melambat tapi sebetulnya hasilnya naik, pajaknya juga naik tinggi Pak. Kenapa ada fenomena seperti itu? Ya itu tadi unreported tadi Pak, pengusaha melaporkannya itu 2 ribu ton, dia laporannya Cuma 20 ton Pak sampai ada yang sms-an sama saya iya Bu Susi maunya berapa, saya bilang saya kamu mau jujur saja, ya kalau gitu saya naikin jadi 2 milyar ya Bu. Itu belum benar, saya nggak akan kasih izin keluar, kalau gitu berapa? 4 milyar, belum mau saya, 6 milyar? Belum mau saya, terus maunya berapa? Malah begitu Pak. Jadi memang selama ini yang dilaporkan itu jauh seklai di bawah, saya bilang kalau kamu dapat 1 milyar saja itu kamu pasti rugi, kenapa kamu minta tambah izin kapal dan akhirnya kita sudah diperbaiki, naik kelihatan Pak. Pajaknya kan naiknya hampir 700 milyar lebih, sudah 1,2 trilyun sekarang. Kita perkirakan tahun 2018 ini bisa sampai 2 trilyunan, hanya memperbaiki saja Pak. Jadi kemarin Pak Ketua, jadi bukan saya mempersulit tapi memang kita sengaja menahan sampai mereka bisa memperbaiki.

Kemudian tadi kesulitan yang Ibu ada untuk izin perdagangan, jadi setelah pajak keuangan itu tahu bahwa PDB perikanan ini rendah mereka itu mengharuskan sinkronisasi semua data. Tadi saya bilang data BKIPM misalnya 6 trilyun, data bea cukai Cuma 4 trilyun, beda 20 trilyun Pak, itu dari data tahun 2017 saja. Akhirnya

mereka membuat SK Menteri Keuangan yang mengharuskan PEB hanya keluar kalau ada rekomendasi BKPIM supaya nyambung tadi. Memang waktu itu kita belum ada sosialisasi, jadinya para pengusaha ini kesulitan tapi Cuma 1 bulan kok Bu, sekarang mereka semua sudah tahu akhirnya sekarang ngisi apa adanya. Jadi kalau sudah sama dari hal certificate misalnya harganya 1 milyar, pemberian ke bea cukai juga 1 milyar ya lolos, tapi kalau bea cukainya dibikin 500 juta dia nggak akan lolos. Itu sebetulnya permasalahan-permasalahan itu, jadi kita memang besar-besaran memperbaiki manajemen data dan supporting-nya Pak, karena itu satu-satunya untuk membuktikan bahwa perikanan ini sebetulnya potensinya besar sekali tapi sekarang ini nggak kelihatan karena ilegal unreported unregulated.

Sekarang ilegal ini sudah hampir tidak ada, semua kapal Indonesia, pengusaha Indonesia sudah baik ya dan hasilnya ternyata kita sekarang nomor 1 di Asia Negara neraca perdagangan perikanan yang tadi dulunya nomor 3 di Asia Tenggara sekarang untuk Asia Tenggara nomor 1 Indonesia. Jadi memang masih ada beberapa hal yang sedikit agak anomali gitu Pak, tapi ya itu karena unreported tadi sekarang kita mulai perbaiki tapi saya mohon juga ini pengertian dari Komisi IV DPR RI karena kadang-kadang para pengusaha ini juga pakai pinjem semua pintu dan approach untuk menekan kita Pak. Saya tetap nggak mau kalau mereka belum memperbaiki, sekarang Dirjen Tangkap sudah kita bikin standar. Kalau pure sign Cuma hasilnya 20 ton ya tidak dikeluarin izinnya habis kalau 70 GT ya harus 1 ton, orang bilang ya kan nangkap ikan di laut belum tentu. Saya bilang itu bukan, kamu kan bilang nangkap ikan bukan mencari ikan. Jaman ini kapal 5 GT saja sudah punya GPS Pak dan kita juga sudah punya release data plankton. Jadi tidak ada kapal ke laut tidak dapat sekarang, semua kapal ke laut pasti dapat ikan karena dia pasti pergi ke tempat yang ada ikan. Jadi tidak ada untung-untungan, tidak ada apalagi kapal 30 GT ke atas yang izinnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan saya setuju semestinya kita tidak lagi menggunakan kapal di atas 10 GT itu nelayan, itu adalah pengusaha Industri penangkapan ikan, supaya clear nelayan itu ya yang di bawah 10 GT yang dibantu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan fasilitas, sarana dan pra sarananya, kapalnya, alat tangkapnya. Jadi barangkali itu yang harus disamakan, jadi kemarin-kemarin sampai hari ini masih kita kencengin ya hanya untuk perbaikan saja Pak Edhy jadi bukan kita persulit, tidak ada, kita hanya ingin data ini menjadi benar dan perikanan kelihatan hasilnya, itu saja.

Barangkali cukup Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Bapak-Ibu sekalian kalau tidak ada lagi kita ke kesimpulan. Hanya tambahan saja buat Bu Susi kalau memang jangan sampai berkesan pemerintah menghambat, makanya nanti yang terhambat itulah yang harus diumumkan saja. Berarti kan kalau orang lambat ini biasanya tadi ya di tawar-tawaran, tarik-tarikan. Kalau faktanya dia nggak mau, umumkan saja dia kita tidak izinkan karena

sebenarnya kapalnya 30 GT tapi dia ngotot pendapatannya nggak cocok sama, jadi markdown-mark up diangkat saja semuanya perusahaan-perusahaan mana. Jadi jangan yang korban yang ini banyak perusahaan-perusahaan yang jujur akhirnya jadi korban, akhirnya orang yang mau investasi benar di sektor laut gara-gara ada aturan nggak boleh pake kapal luar negeri dia belinya luar negeri, impor kapal bener pakai aturan yang benar tetapi dia nggak operasional gara-gara dia dibuat di luar padahal ini perusahaan benar misalnya, ada juga yang begitu. Ini juga belum ada jalan keluarnya tapi ya silakan Ibu sebagai pelaksana di lapangan kami percayakan dan kami tidak pernah juga mau dijadikan alat untuk menekan, yang kami lakukan adalah fakta yang benar akan kita benarkan, yang nggak benar akan kita luruskan.

Saya pikir ini teman-teman sekalian, iya Pak Hasanuddin silakan.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Sedikit saja, mumpung ada PT Garam. Di masyarakat beredar bahwa garam itu di impor, kita minta penjelasan saja jangan sampai ada salah faham dari masyarakat terhadap garam, garam mana yang impor.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Tadi Bu Menteri sudah jelaskan garam, tapi silakan saya pikir yang jelaskannya itu Bu Menteri, bukan PT Garam, PT Garam atas perintah Bu Menteri.

Kami persilakan Bu Menteri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Pak Ketua, Bapak yang kita adakan impor itu hanya garam non konsumsi Pak, garam Industri. Kenapa muncul harus impor garam Industri? Karena produksi garam kita tidak cukup. Bahwa kemarin ada isu sedikit ini karena memang ada perbedaan pandang antara kami dengan Menteri Perdagangan. Jadi impornya terlalu banyak sementara sekarang hasil petani naik, itu saja Pak. Tapi kalau kita sekarang suruh nyukupi kebutuhan semua tidak boleh impor, itu tidak akan cukup. Tetapi bahwa impor sudah bisa dikurangi, itu betul.

Itu saja Pak

KETUA RAPAT:

Baik, kita langsung kepada kesimpulan.

Kesimpulan pertama, Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas realisasi serapan APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2018 sebesar Rp. 6.097.592.223.897 atau 79,89%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dari pagu sebesar Rp. 7.632.526.314.000 dan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan capaian kerja pada tahun mendatang.

Teman-teman bagaimana dengan istilah kata-katanya udah oke ya, Bu Menteri setuju?.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Kesimpulan nomor 2, Komisi IV DPR RI menerima penjelasan pagu alokasi APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019 sebesar Rp. 5.483.013.769.000. selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar APBN tahun 2019 dialokasikan antara lain untuk peningkatan dan penguatan pemberdayaan serta kesejahteraan pelaku utama perikanan yakni melayani pembudidaya ikan dan petambak garam serta pengolah dan pemasaran hasil perikanan.

Ada yang perlu ditambahkan, Bu Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Cukup Pak.

KETUA RAPAT:

Teman-teman setuju?.

(RAPAT: SETUJU)

Kesimpulan nomor 3, Komisi IV DPR RI menyetujui usulan dana alokasi khusus atau DAK bidang kelautan dan perikanan tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 905.200.000.000 yang terdiri atas DAK provinsi sebesar Rp. 290.683.725.000 dan DAK kabupaten dan kota sebesar Rp. 614.516.275.000.

Angkanya sudah benar Pak Sekjen? Teman-teman setuju?.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 4, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019 di provinsi Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan Bali.

Setuju Bu?.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Baik, Bapak-Ibu sekalian.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja kita hari ini, sebelum diakhiri kami persilakan Bu Menteri untuk menyampaikan kata penutupnya.

Kami persilakan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Bapak Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Sesuai dengan apa yang telah kita setuju dalam rapat ini saya ucapkan terima kasih atas seluruh support dan dukungan dari Komisi IV kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan selama ini, sehingga berjalan program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan baik.

Demikian, akhirul kalam.

Wassalammu'ailakum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak-Ibu sekalian.

Kami mewakili Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI mengucapkan banyakk terima kasih atas kehadirannya dalam Rapat Kerja ini, kami juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam selama mungkin dalam rapat dan jalannya Rapat Kerja hari ini.

Dengan mengucapkan *alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, rapat kami akhiri.

Wabillahittaufig wal hidayah.

Wassalammu'ailakum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang salam sejahtera buat kita semua.

Ohm shanti-shanti ohm.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.30 WIB)

Jakarta, 21 Januari 2019

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
NIP. 196301221991031001